

**PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

Disajikan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh :

ZULFIKAR

1109130/2011

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014

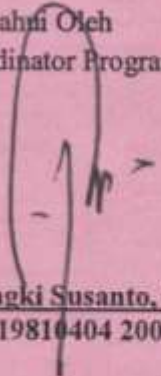
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Nama : Zulfikar
BP/NIM : 2011/1109130
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III


Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Disetujui Oleh
Pembimbing


Halmawati, SE, M.Si
NIP : 197403032008122001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

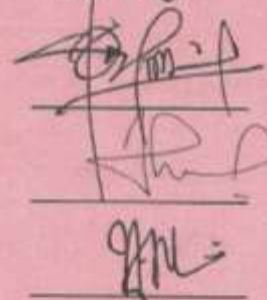
Nama : Zulfikar
NIM : 1109130
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2015

Nama	Tim Penguji
1. Ketua	: Halmawati, SE, M.Si
2. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
3. Anggota	: Herlina Helmi, SE, MS.Ak

Tanda Tangan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfikar
Thn. Masuk/NIM : 2011/1109130
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/09 Agustus 1992
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln.Batuang Taba Rt 01 Rw 01 No.14 Kel. Batuang Taba
Judul Tugas Akhir : Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Hp : 083182292934

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ke tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Febuary 2015

Yang menyatakan,



BP/NIM.2011/110930

ABSTRAK

Zulfikar : “Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Bentuk penelitian tugas akhir ini berupa penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kedinas terkait. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di jalan Asahan No. 2 Padang. Jenis penelitian termasuk kedalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai suatu fenomena namun dalam hal pengumpulan data digunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, proses penyusunan anggaran yang dilakukan DPKD Provinsi Sumatera Barat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anggaran pemerintahan yang salah satunya yaitu Permendagri No. 13 tahun 2006.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pembimbing Ibu Halmawati, SE,M.Si yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sampai selesai tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak/Ibu penguji yang telah meluangkan waktu, serta ilmunya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, beserta seluruh karyawan dan Staf Adm.
5. Pustakawan/wati perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dan materil.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki sangat terbatas, maka untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya penulisan tugas akhir ini sangat penulis harapkan.

Harapan penulis semoga karya tulis ini memberi arti dan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat usaha ini sebagai amal kebaikan kepada kita semua Aamiin. ☺

Padang, Februari 2015

Zulfikar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anggaran	6
B. Karakteristik Anggaran	7
C. Fungsi Anggaran	8
D. Tujuan Penyusunan Anggaran	11
E. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik.....	12
F. Proses Penyusunan dan Siklus Anggaran	12
G. Sistem Penyusunan Anggaran.....	14
H. Prinsip/Azaz Penyusunan Anggaran	17
I. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD	19
J. Klasifikasi Biaya.....	21
K. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Penyusunan Anggaran.....	26
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Rancangan Penelitian.....	28
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi. Sumatera Barat	31

1. Sejarah Singkat Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi. Sumatera Barat	31
2. Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	32
3. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	32
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	33
5. Struktur organisasi	34
B. Pembahasan	45
1. Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat...	45
2. Analisa Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	52
3. Klasifikasi Biaya (Belanja) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat..	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Klasifikasi belanja DPKD Provinsi Sumatera Barat.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Observasi.
2. Surat Pengantar Observasi Dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
3. RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
4. Renstra DPKD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
5. Indikator Kinerja Utama DPKD Provinsi Sumatera Barat 2012
6. Program Kerja DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma manajemen keuangan pemerintahan saat ini menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja, bukan pada biaya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang pengelolaan uang negara. Kinerja yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian visi dan misi yang sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat rencana keuangan yang dituangkan dalam bentuk anggaran dalam rangka mencapai tujuan atau program kerja pemerintahan.

Proses penyusunan anggaran berpengaruh penting untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Proses adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, proses penting bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan)

moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar2001: 3)

Anggaran adalah alat bagi manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Tanpa anggaran masing-masing bagian dan individu pada perusahaan baik swasta maupun instansi pemerintahan cenderung bekerja dengan inisiatif sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang mengakibatkan terjadinya penghamburan sumber daya, tidak ada alat dan mekanisme kontrol oleh atasan dan efek buruk lainnya. Akibatnya strategi besar operasional tidak berjalan sesuai dengan keinginan, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan dan instansi tidak akan tercapai.

Instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, dituntut melakukan pembahasan yang mendalam untuk menyusun program-program kerja, dan mendesain aktivitas anggaran sehingga betul-betul berdasarkan pada orientasi untuk mencapai satu tujuan. Dalam pengelolaan uang Negara sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa di dalam penyusunan anggaran pada instansi pemerintah harus berorientasi pada kinerja.

Anggaran idealnya bertujuan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba dan salah satu bentuk anggaran dalam perusahaan adalah anggaran operasional. Anggaran terhadap perencanaan aktivitas operasional dapat dituangkan dalam bentuk anggaran operasional. Anggaran biaya operasional yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan utama Dari operasional perusahaan.

Mengingat besarnya manfaat anggaran bagi suatu organisasi, maka anggaran tersebut harus disusun secara baik. Penyusunan anggaran yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan tingkat kesulitan anggaran. Oleh karena itu untuk merancang anggaran pemerintah, diperlukan system anggaran yang memadai.

Penyusunan anggaran yang komprehensif dapat mempermudah diadakannya evaluasi atas hasil pelaksanaan yaitu dengan melaporkan hasil pelaksanaan yang sesungguhnya yang kemudian akan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Penganggaran sektor public berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor public dimulai dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Penganggaran sektor public harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan efektif apa bila diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang mencakup kepada renja pemerintahan.

Dari uraian diatas, penyusunan anggaran yang baik dan tepat sasaran sangat penting dan penulis tertarik untuk menjadikanya sebagai pemikiran penulis dalam bentuk sebuah Tuga sakhir, dengan judul “**Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat**” .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah disampaikan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengklasifikasian belanja (biaya) yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui klasifikasi belanja (biaya) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses penyusunan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi Dinas, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan proses penyusunan anggaran yang lebih baik lagi.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan atau bahan pertimbangan yang berguna dalam mengetahui tentang proses penyusunan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki tahapan-tahapan yang dilandaskan pada peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang anggaran pemerintah yang salah satunya yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006. Adapun tahapan dari penyusunan anggaran ini yaitu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD, kemudian berdasarkan Rencana Kerja ini DPKD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan diserahkan kepada Tim TAPD dan Banggar DPRD untuk diproses dan ditetapkan. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran ditetapkan selanjutnya DPKD menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang berisikan sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Hingga hasil akhirnya yaitu tersusunlah sebuah modul anggaran pemerintahan.
2. Dalam pengklasifikasian belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya

dengan aktivitas, dimana pada hubungan ini belanja terbagi atas dua yaitu: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, namun pada DPKD lebih di dominasi oleh belanja langsung. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai yang berupa uang lembur PNS, belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan pengadaan, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas dan belanja perlengkapan atau peralatan pakai habis, sedangkan belanja modal merupakan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mini bus. Pengklasikasian ini disesuaikan dengan kegiatan yang ada pada DPKD Prov.Sumbar dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 sebagai landasan pengklasifikasiannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan anggaran merupakan proses yang sangat menentukan capaian, tujuan dan arah kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu disarankan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam proses penganggaran tersebut dimulai dengan mengikut sertakan semua bagian atau divisi yang ada agar penyusunan anggaran lebih tepat sasaran sehingga visi, misi dan tujuan DPKD dapat tercapai dengan baik.

2. Disarankan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat agar lebih memperluas klasifikasi anggaran yang ada pada setiap pelaksanaan kegiatan agar tidak didominasi oleh belanja langsung saja dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan akan lebih beragam namun tidak melenceng dari visi, misi dan rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disusun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Wahyu. 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*, Jakarta :Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : ANDI
- Munandar, M.2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Dan Pengawasan Kerja*,Yogyakarta :Penerbit BPFE.
- Saputra, Gunawan Adi dan Marwan Asri. 2000. *Anggaran Perusahaan*, Yogyakarta : PenerbitBPFE.
- Sugono, Dendy.2008. Kamus lengkap Bahasa Indonesia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*, Bandung : ALFABETA
- Narifin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta :SalembaEmpat.
- Tim Penulis. 2013. “Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir FE UNP”. Padang.
- Widjajanto.2006.*Sistem informasi akuntansi Edisi 1*.Jakarta: Salemba Empat